

ARAH KEBIJAKAN SPBE **MENUJU ERA** TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH

Rencana Perubahan Kebijakan Kedepan

Forum Bisa Tanya Kebijakan – 31 Januari 2025

Arah Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah



PERJALANAN PENGEMBANGAN SPBE DAN KEBIJAKAN SPBE DI INDONESIA

Perpres Percepatan Transformasi Digital dirancang dengan membawa semangat Perpres SPBE dan Satu Data, mempedomani Arsitektur SPBE Nasional, untuk **membawa dampak aktual peningkatan kepuasan masyarakat, daya saing ekonomi digital, dan capaian indeks global pemerintahan digital.**



Peningkatan kepuasan masyarakat dan daya saing ekonomi digital

AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAHAN INDONESIA



Peningkatan capaian indeks global pemerintahan digital

- Peran Kementerian Koordinator
- Peran Tim Koordinasi SPBE Nasional
- Peran K/L terkait (KBUMN, BPKP)

Perpres 82/2023

Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

- Penugasan Perum Peruri sebagai GovTech Indonesia
- Fokus **9 aplikasi prioritas** TW 3 2024
- Klausula **Pengakhiran/Terminasi** Aplikasi untuk Efektifitas dan Efisiensi
- **Penganggaran dan pendanaan**

Perpres Arsitektur SPBE Nasional

- 1 Arsitektur SPBE Nasional
- 2 Target Inisiatif Strategis 2024



Perpres SPBE:
Prinsip keterpaduan dan tata kelola melalui pelaksanaan Arsitektur SPBE

Perpres Satu Data Indonesia:
Manajemen data SPBE dan Domain Data dan Informasi Arsitektur SPBE





PERUBAHAN PARADIGMA E-GOVERNMENT – DIGITAL GOVERNMENT

Melalui pemanfaatan **Arsitektur SPBE**, pemerintah Indonesia dapat melompat fase digitalisasi administrasi pemerintahan, menuju fase **GovTech**

id.EA
(Indonesia Enterprise Architecture)

e-Government

1. Layanan berbasis user & penyediaan oleh instansi
2. Layanan berbasis elektronik, masih terdapat kegiatan fisik
3. Interoperabilitas Sistem Informasi

GovTech

1. Layanan inklusif berbasis Citizen Centric, berbasis outcome
2. Implementasi Transformasi Digital secara Nasional (Government-Wide)
3. Sistem Pemerintah yang sederhana, efisien, & transparan

Fase digitalisasi Indonesia



Indonesia
@palm_ur_hand

Analog Government

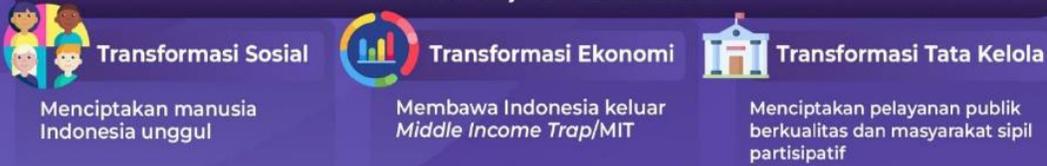
Digital Government

1. Desain prosedur layanan berbasis digital
2. Layanan bersifat citizen centric
3. Data-driven policy
4. Proaktif layanan administrasi pemerintah

Transformasi Indonesia Menuju Indonesia Emas

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lalu. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan.

Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045



Arah (Tujuan) Pembangunan



Keberhasilan transformasi secara menyeluruh baik di tataran nasional maupun daerah perlu didukung oleh landasan transformasi sebagai faktor pempampu

Landasan Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045



Arah (Tujuan) Pembangunan



*IE = Indonesia Emas

Visi Indonesia Emas 2045

UU 59/2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045

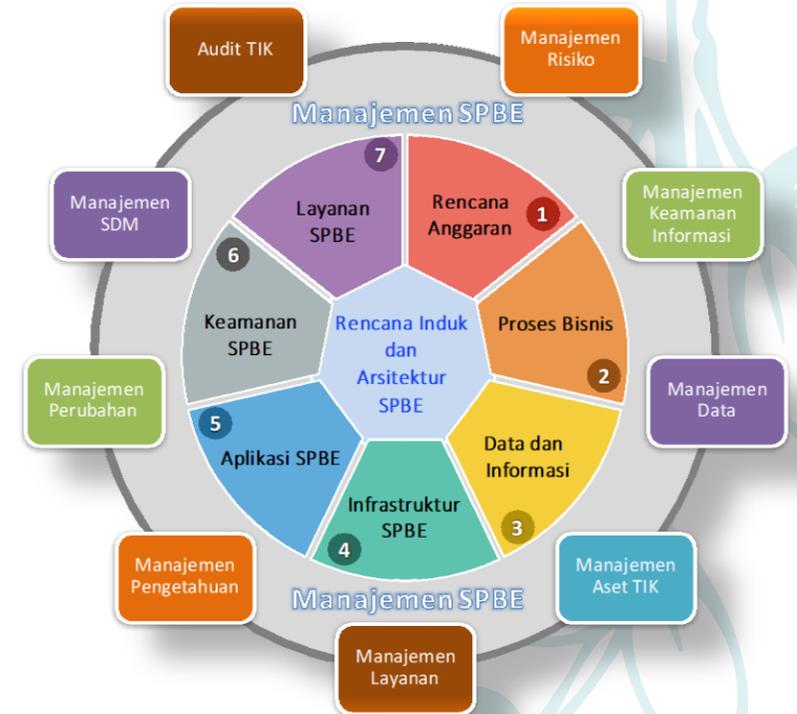


Pentahapan RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045

PENTAHAPAN RPJP NASIONAL MENENTUKAN RENCANA PENGEMBANGAN SPBE KEDEPAN



Pentahapan RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045

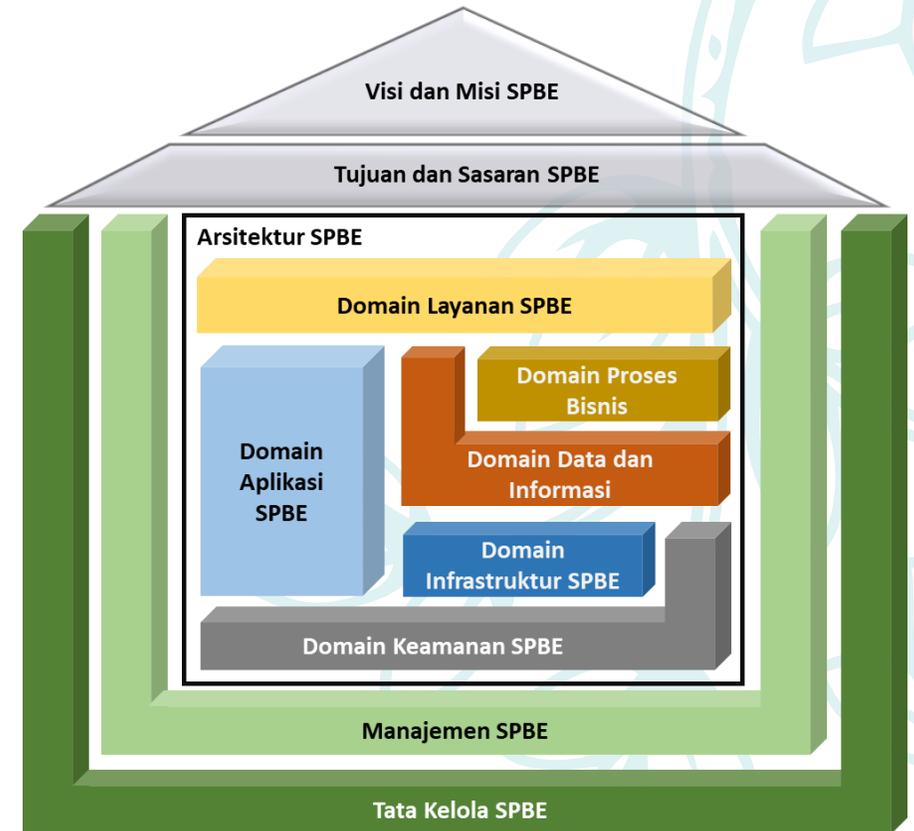


Kerangka Kerja Perpres 95/2018

PENTAHAPAN RPJP NASIONAL MENENTUKAN RENCANA PENGEMBANGAN SPBE KEDEPAN



Pentahapan RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045



Kerangka Kerja Perpres 132/2022

PROGRES DAN RENCANA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DIGITAL

Penyusunan RUU Transformasi Digital Nasional

FGD Pembahasan Urgensi RUU Transformasi Digital

Sebagai tindak lanjut pengusulan RUU dalam **Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029** di Lingkungan Pemerintah melalui BPHN, bertujuan mengakomodir masukan serta menyelaraskan pemahaman atas urgensi RUU TDN.

Penekanan bahwa posisi KemenPANRB tidak harus sebagai pemrakarsa.



Tim Koordinasi SPBE Nasional
(Senin, 11 November 2024)



Instansi terkait Ekonomi & Masyarakat Digital
(Selasa, 12 November 2024)



Pilar Ekonomi Digital



Pilar Pemerintahan Digital



Pilar Masyarakat Digital

Progres:

Menunggu Keputusan BPHN untuk masuk dalam **Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029**

Rencana Penyusunan Kebijakan **Pemerintah Digital**

Tata Kelola Pemerintahan Digital	Manajemen & Audit TIK	Penyelenggara Pemerintah Digital	Pengembangan Sistem Prioritas	Evaluasi Pemerintah Digital
<ol style="list-style-type: none"> Rencana Induk Arsitektur pemerintah digital Peta Rencana Rencana dan Anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> Manajemen perubahan Manajemen SDM Monitoring SLA Audit TIK (penambahan BPKP dalam proses audit) 	<ol style="list-style-type: none"> Tim Koordinasi Pemerintah Digital (Penambahan Menko, KBUMN, INA Digital, BPKP) Tata kerja tim koordinasi pemerintah digital 	<ol style="list-style-type: none"> Infrastruktur publik digital Penambahan layanan publik pada PPP Penambahan layanan adpem pada PAP 	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi proses Evaluasi dampak Survei pengguna SPBE Indeks Pemerintah Digital

Revisi kebijakan SPBE yang akan dilakukan

Revisi dilakukan untuk penyelarasan strategi pemerintah digital dengan **RPJPN 2025-2045, GDRBN 2025-2045, dan RPJMN 2025-2029**

Revisi Perpres 95/2018

Revisi Perpres 82/2023

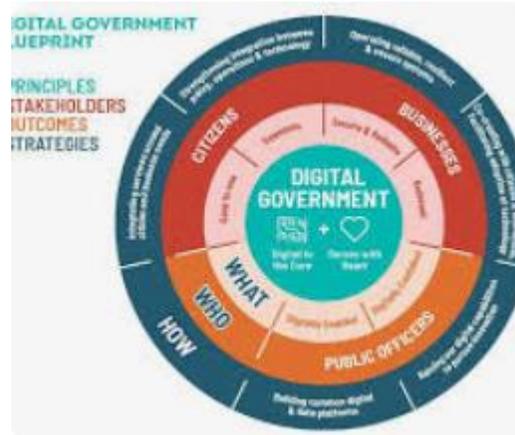
Revisi Perpres 132/2022

Rperpres Pemerintah Digital

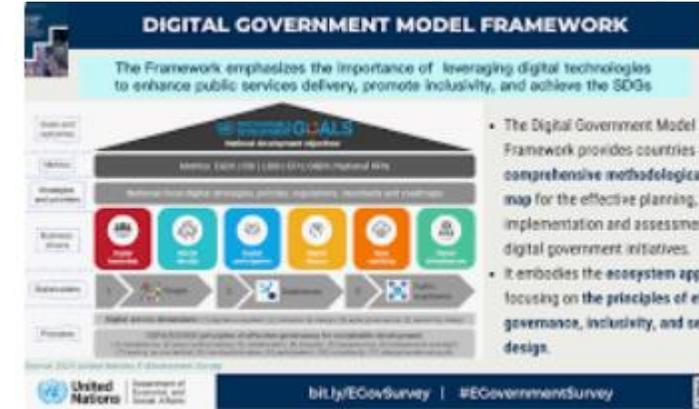
Rperpres Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Digital

Rencana Perubahan Perpres 95/2018 – Tentang SPBE

RENCANA PERUBAHAN PERPRES 95/2018 TENTANG SPBE



SINGAPURA

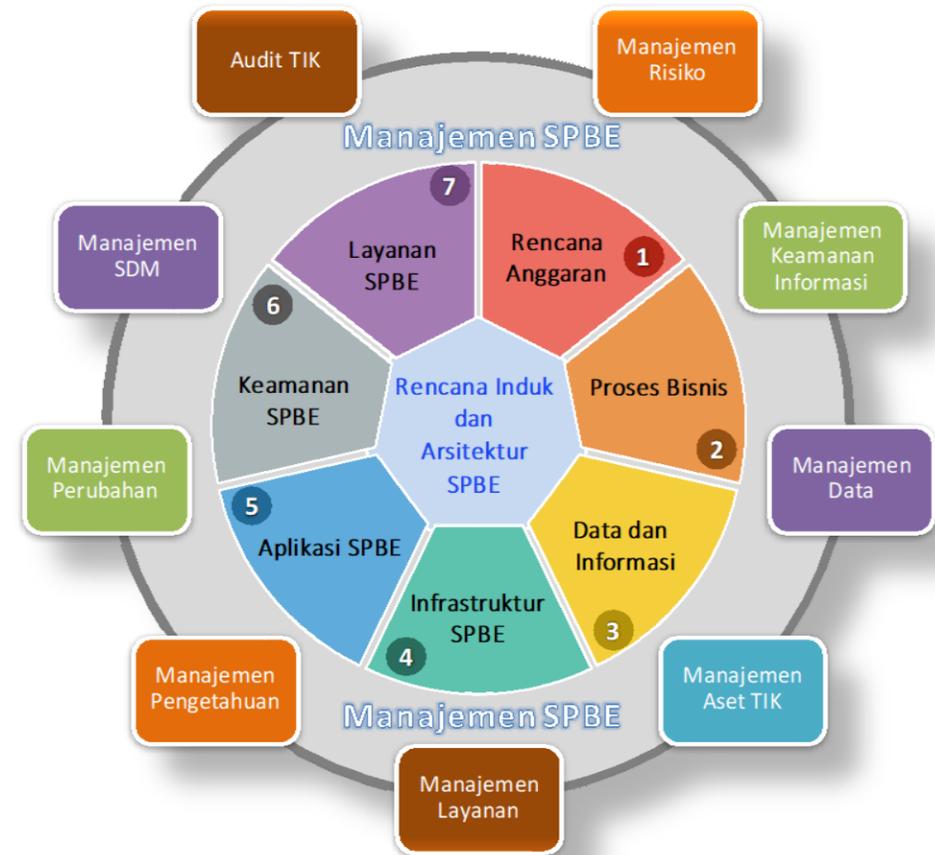
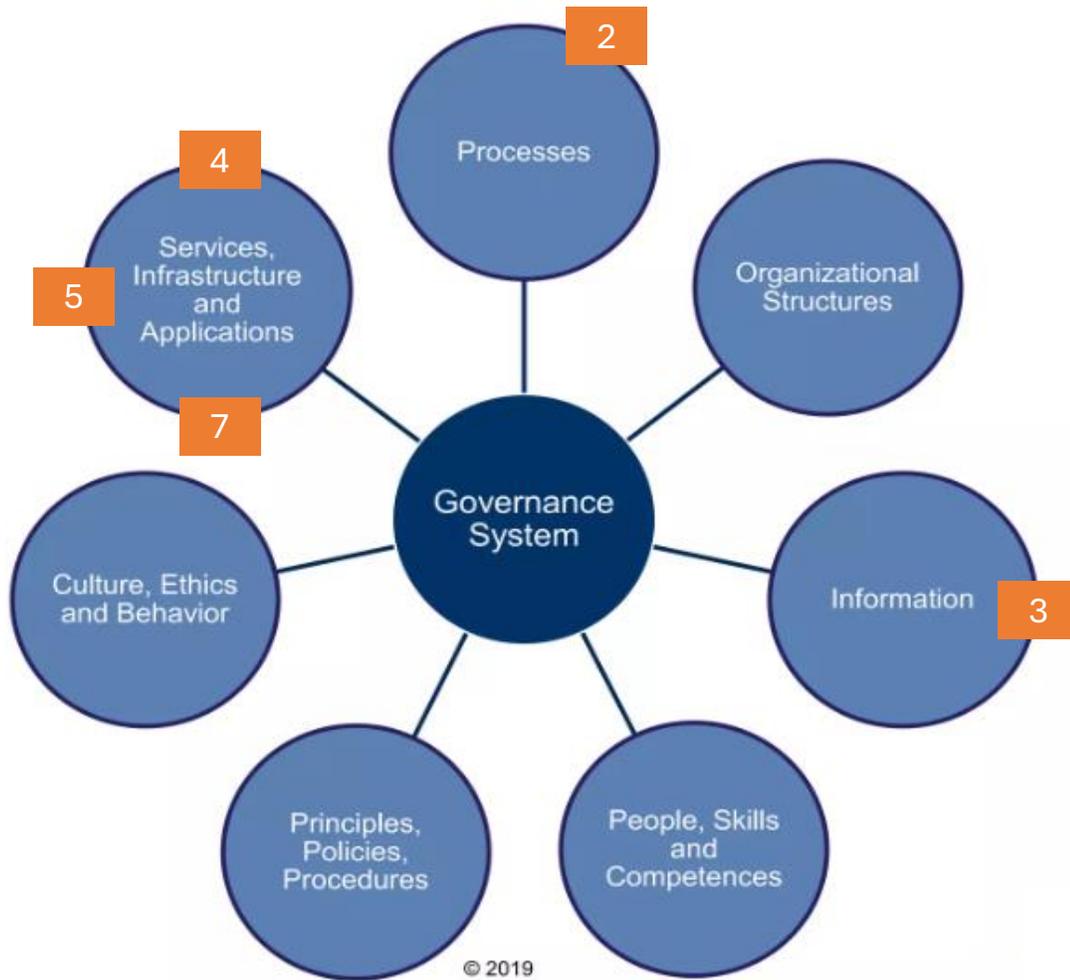


UNITED NATION



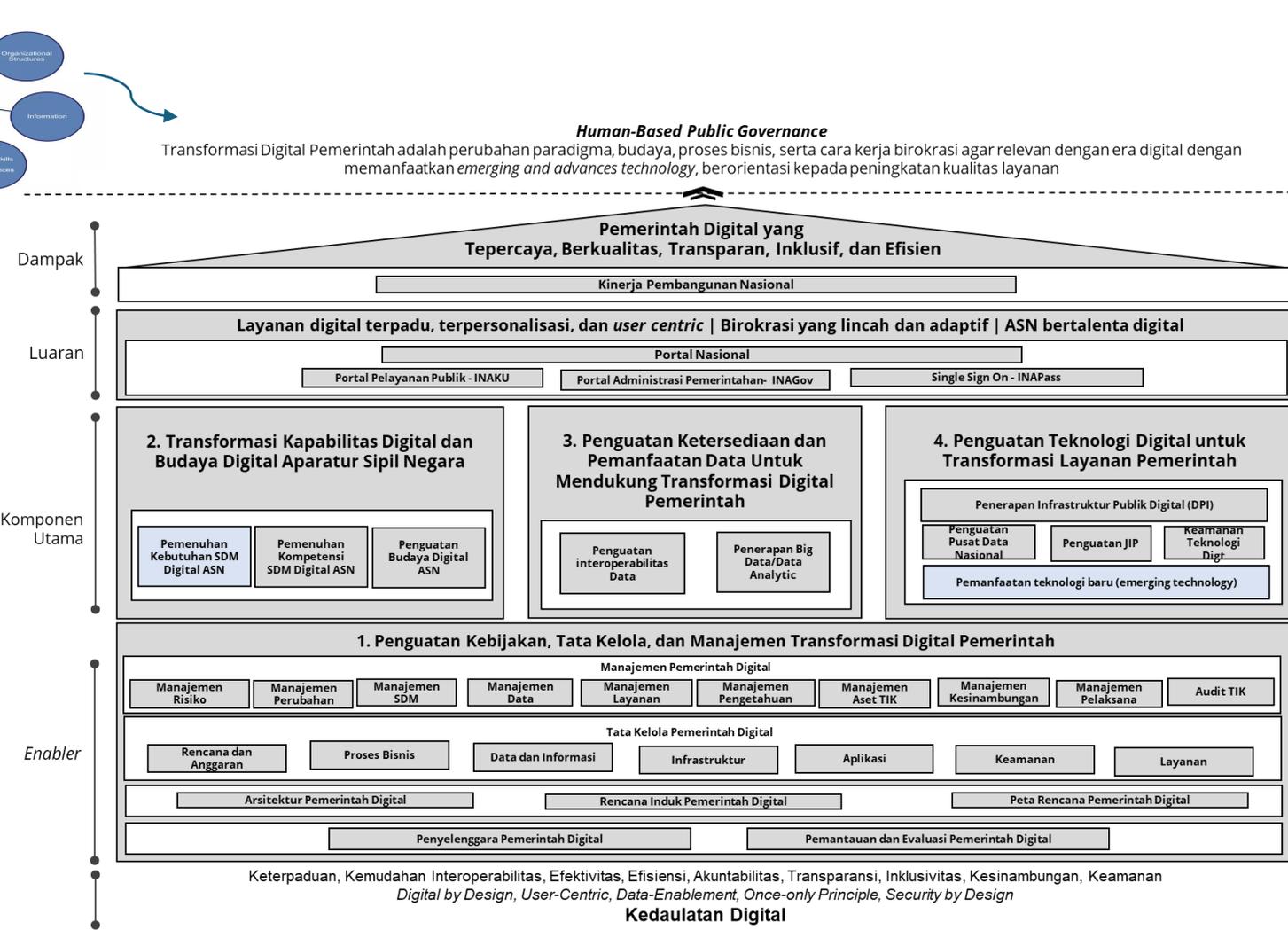
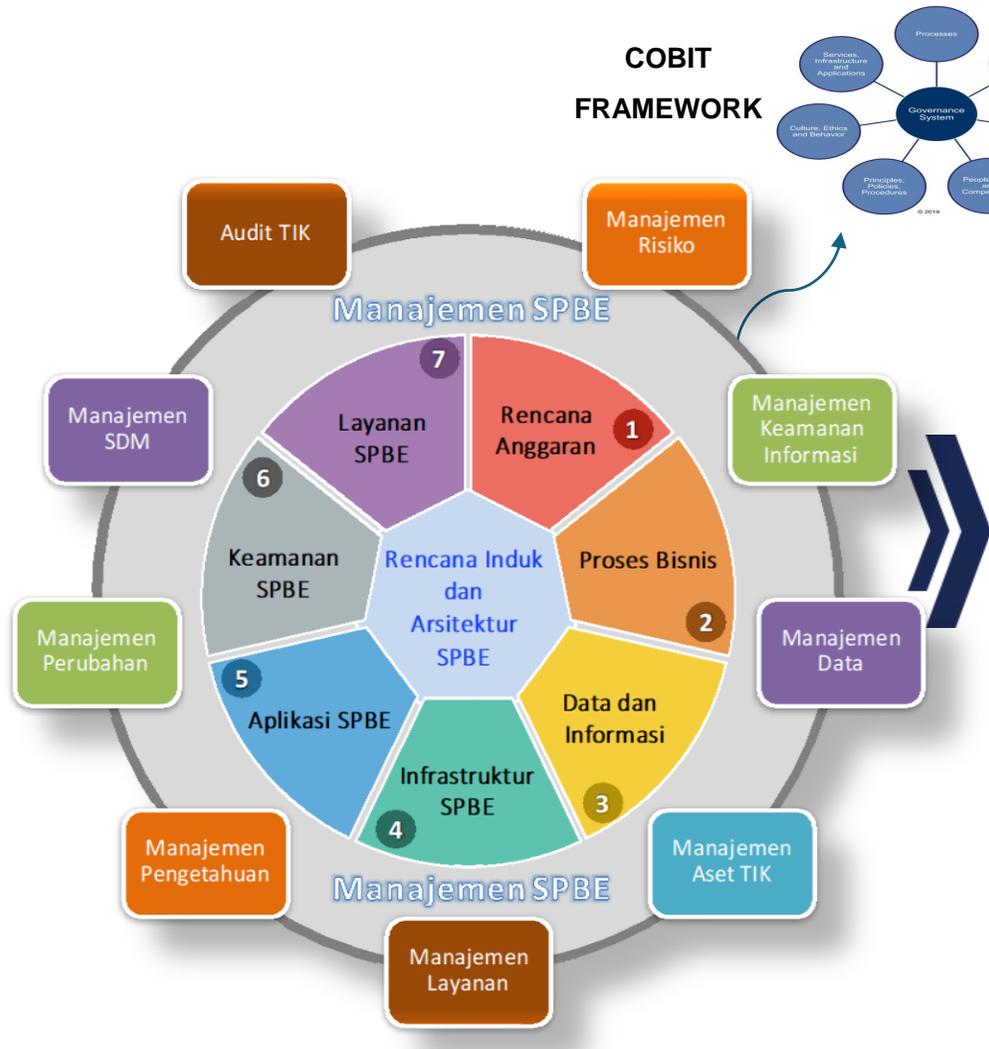
MALAYSIA

RENCANA PERUBAHAN PERPRES 95/2018 TENTANG SPBE



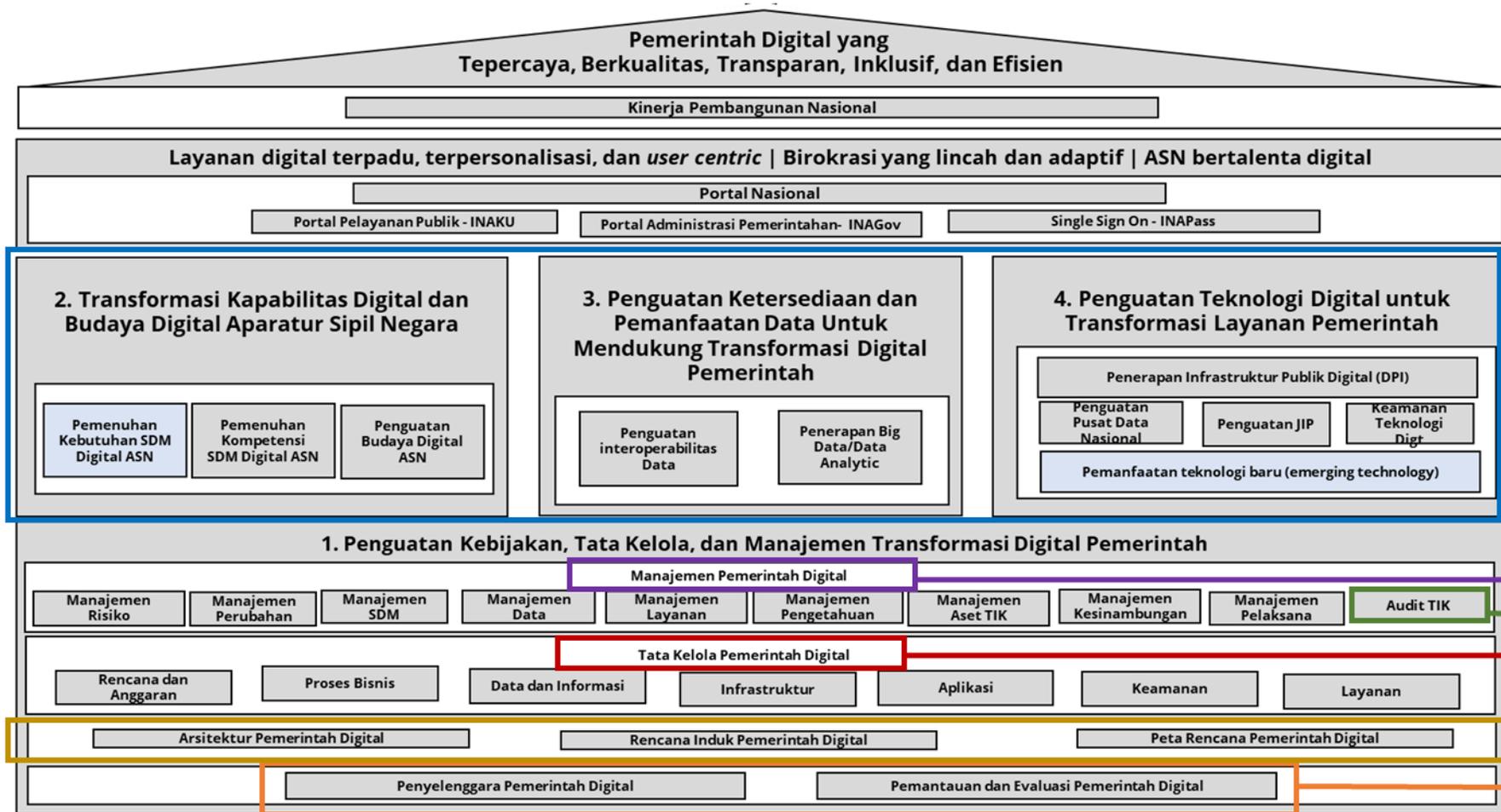
COBIT 2019 – GOVERNANCE SYSTEM (COBIT COMPONENT)

RANCANGAN KERANGKA OPERASIONAL TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH





RENCANA PERUBAHAN SUBSTANSI PERPRES 95/2018 TENTANG SPBE



Bab 1
Ketentuan Umum

Bab 2
Strategi Pemerintah Digital

Bab 3
Tata Kelola Pemerintah Digital

Bab 4
Manajemen Pemerintah Digital

Bab 5
Audit TIK

Bab 6
Percepatan Pemerintah Digital

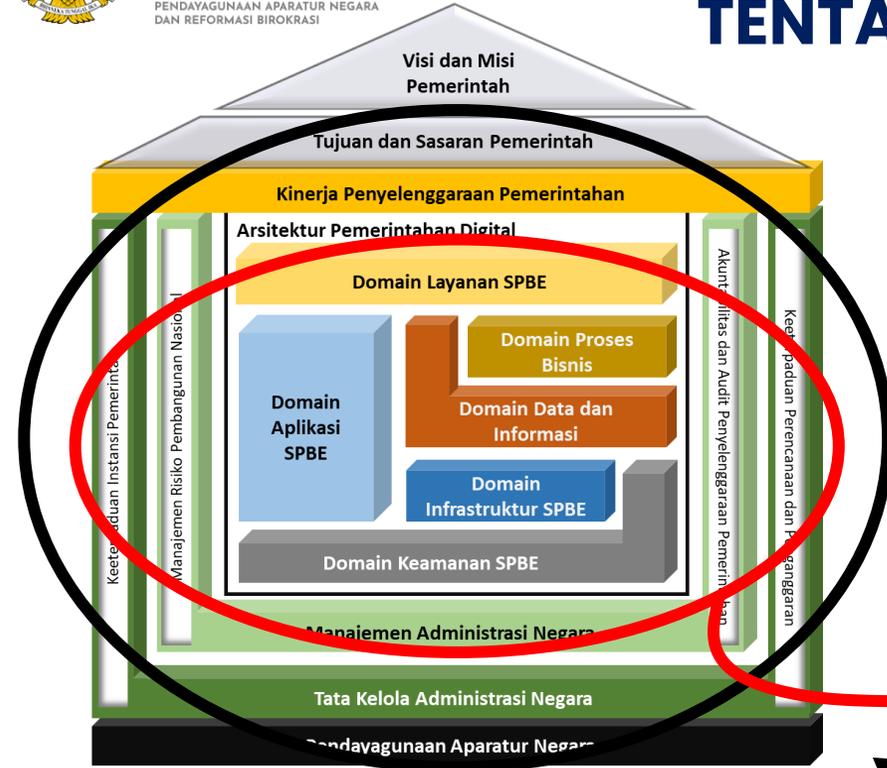
Bab 7
Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintah Digital

Bab 8
Ketentuan Peralihan

Bab 9
Ketentuan Penutup

Rencana Perubahan Perpres 132/2022 – Tentang Arsitektur SPBE

RANCANGAN PERUBAHAN PERPPRES 132/2022 TENTANG ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL



Bab 1
Pendahuluan

1. RPJPN 2025-2045
2. RPJMN 2025-2029
3. Kebijakan Pemerintah Digital (Revisi Perpres 95/2018) – Rencana Induk Pemerintah Digital
4. Kebijakan Satu Data Indonesia

Bab 2
Arah Kebijakan dan Strategi

Bab 3
Inisiatif Strategis Arsitektur Pemerintah Digital Nasional

1. **Inisiatif strategis**
2. Keluaran yang menjadi target
3. **K/L penanggung jawab**

Bab 4
Kerangka Kerja Arsitektur Pemerintah Digital

1. Kerangka kerja Pemerintahan Digital
2. Kerangka kerja arsitektur Pemerintah Digital

Bab 5
Referensi Dan Metadata Arsitektur Pemerintah Digital

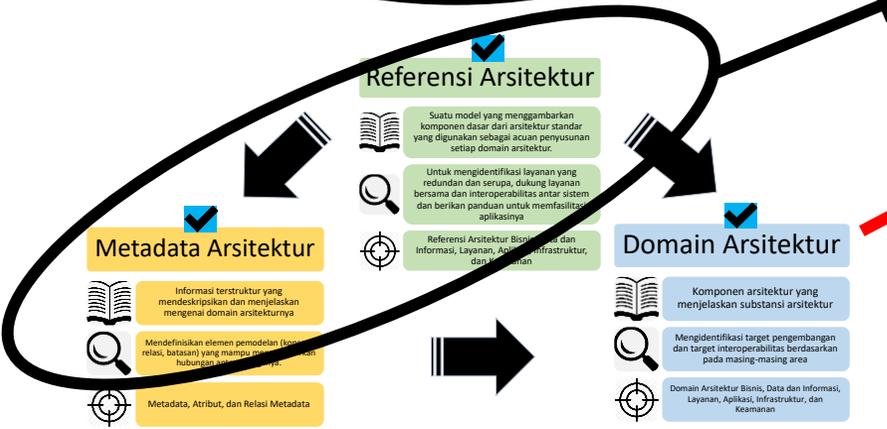
1. **Target domain arsitektur 2025-2029 (to be condition)**
2. Pemetaan Referensi Arsitektur
3. Keterkaitan antar domain arsitektur

Bab 6
Domain Arsitektur Pemerintah Digital Nasional

Bab 7
Tata Kelola Arsitektur Pemerintah Digital

1. Pengelolaan Arsitektur Pemerintah Digital
2. Siklus Arsitektur Pemerintah Digital
3. Tim Arsitek Pemerintah Digital
4. Forum Arsitektur Pemerintah Digital

Bab 8
Penutup



DASAR PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. PENDAHULUAN

2. ARAH KEBIJAKAN

3. INISIATIF STRATEGIS

4. KERANGKA KERJA

5. REFERENSI ARSITEKTUR

6. DOMAIN ARSITEKTUR

7. TATA KELOLA

Dokumen Visi Indonesia Digital 2045



Government 2071



Agenda Pembangunan

Transformasi Sosial
 Transformasi Ekonomi
 Transformasi Tata Kelola
 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
 Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi



RPJPN 2025 - 2045

- 5 Sasaran Visi Indonesia Emas 2045
- 17 arah pembangunan dan 45 indikator pembangunan



PROGRAM PRESIDEN TERPILIH

Visi, Misi, dan Program Prioritas Presiden Terpilih



RPJMN

- Prioritas jangka menengah (hingga proyek strategis)
- Panduan bagi :
 - K/L
 - Pemerintah daerah,
 - BUMN dan Swasta
- Panduan bagi masyarakat

- 01 RPJMN 2025-2029 disusun berdasarkan **tahap pertama** dalam RPJPN 2025-2045;
- 02 Sinkronisasi dilakukan secara bertahap: RPJMN Teknokratik, Rancangan Awal dan Akhir, Rancangan, hingga Penetapan RPJMN

DASAR PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. PENDAHULUAN

2. ARAH KEBIJAKAN

3. INISIATIF STRATEGIS

4. KERANGKA KERJA

5. REFERENSI ARSITEKTUR

6. DOMAIN ARSITEKTUR

7. TATA KELOLA

Gambar 3.7.1 Kerangka Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*)

Agenda Pembangunan

Transformasi Sosial
Transformasi Ekonomi
Transformasi Tata Kelola
Supremasi Hukum, Stabilitas dan
Kepemimpinan Indonesia
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi



Transformasi Sosial

1. Percepatan **wajib belajar 13 tahun** (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan.
2. Peningkatan **partisipasi pendidikan tinggi** dan **lulusan STEAM berkualitas** termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan
3. **Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan** seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
4. **Investasi pelayanan kesehatan primer**, penuntasan *stunting*, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).
5. **Penuntasan kemiskinan** dengan satu sistem Regsosek dan **perlindungan sosial adaptif terintegrasi**.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

5. **Penguatan karakter dan jati diri bangsa**
6. **Reformasi pengelolaan sampah** terintegrasi dari hulu ke hilir
7. **Ketahanan energi dan air serta kemandirian menuju kedaulatan pangan** dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*)

Transformasi Ekonomi

6. Peningkatan **anggaran IPTEKIN** nasional menuju komersialisasi oleh Industri
7. **Industrialisasi**: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
8. **Percepatan transisi energi berkeadilan** menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau
9. **Superplatform** untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital
10. **Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan** pertumbuhan ekonomi
11. Pembangunan **Ibu Kota Nusantara (IKN)**



Transformasi Tata Kelola

12. **Transformasi manajemen ASN** (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), **pemberantasan korupsi, dan pembentukan lembaga pengelola tunggal regulasi**.
13. **Penguatan tata kelola partai politik**

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

1. **Transformasi sistem penuntutan** menuju *single prosecution system* dan **transformasi lembaga kejaksaan** sebagai *advocaat generaal*
2. **Transformasi industri pertahanan** menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional
3. **Reformasi perencanaan dan fiskal**: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi perencanaan dan fiskal
4. **Reformasi subsidi** terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran

DASAR PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. PENDAHULUAN

2. ARAH KEBIJAKAN

3. INISIATIF STRATEGIS

4. KERANGKA KERJA

5. REFERENSI ARSITEKTUR

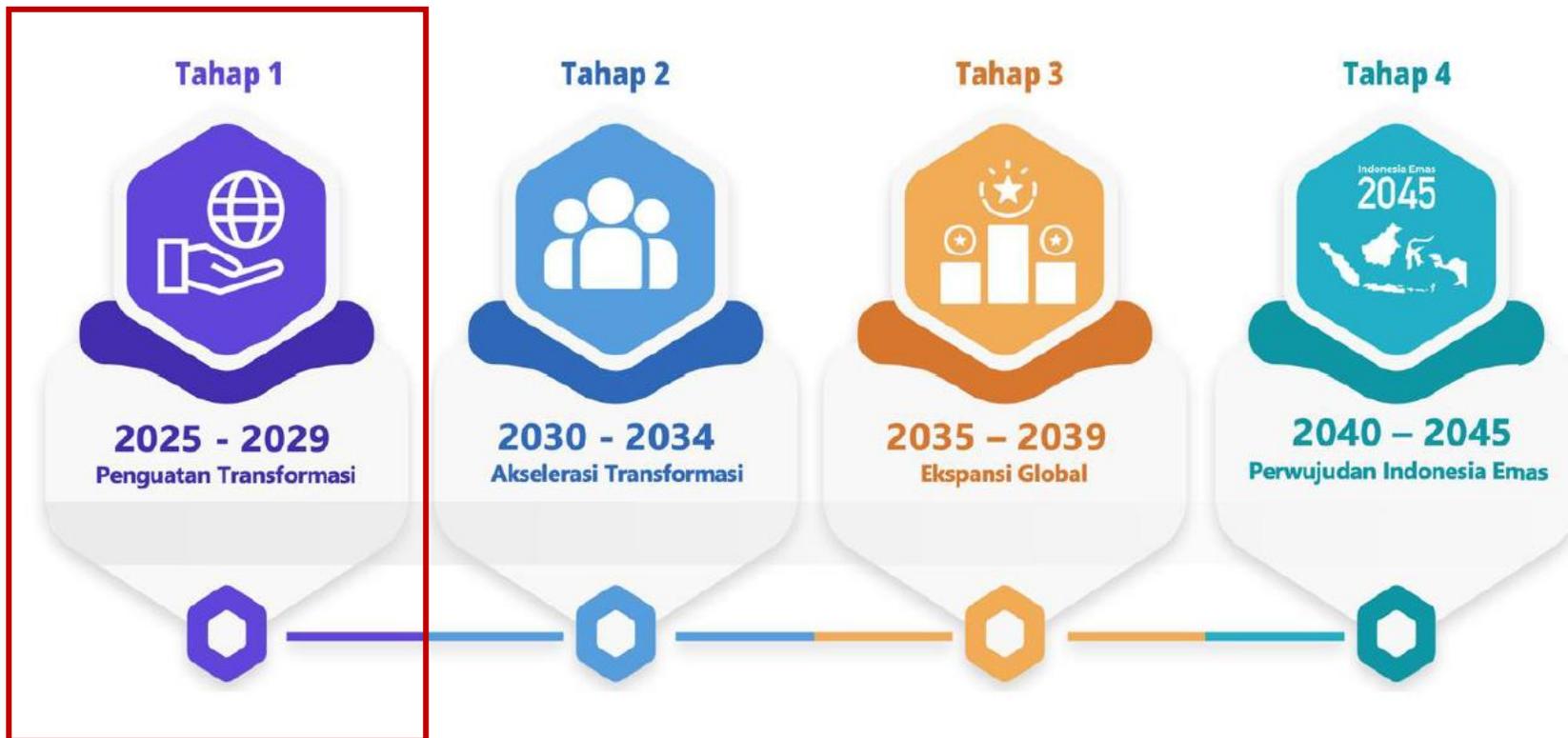
6. DOMAIN ARSITEKTUR

7. TATA KELOLA

Gambar 3.6.1 Pentahapan Implementasi RPJP Nasional Tahun 2025—2045

Agenda Pembangunan

Transformasi Sosial
Transformasi Ekonomi
Transformasi Tata Kelola
Supremasi Hukum, Stabilitas dan
Kepemimpinan Indonesia
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi



INISIATIF STRATEGIS PEMERINTAH DIGITAL NASIONAL

1. PENDAHULUAN

2. ARAH KEBIJAKAN

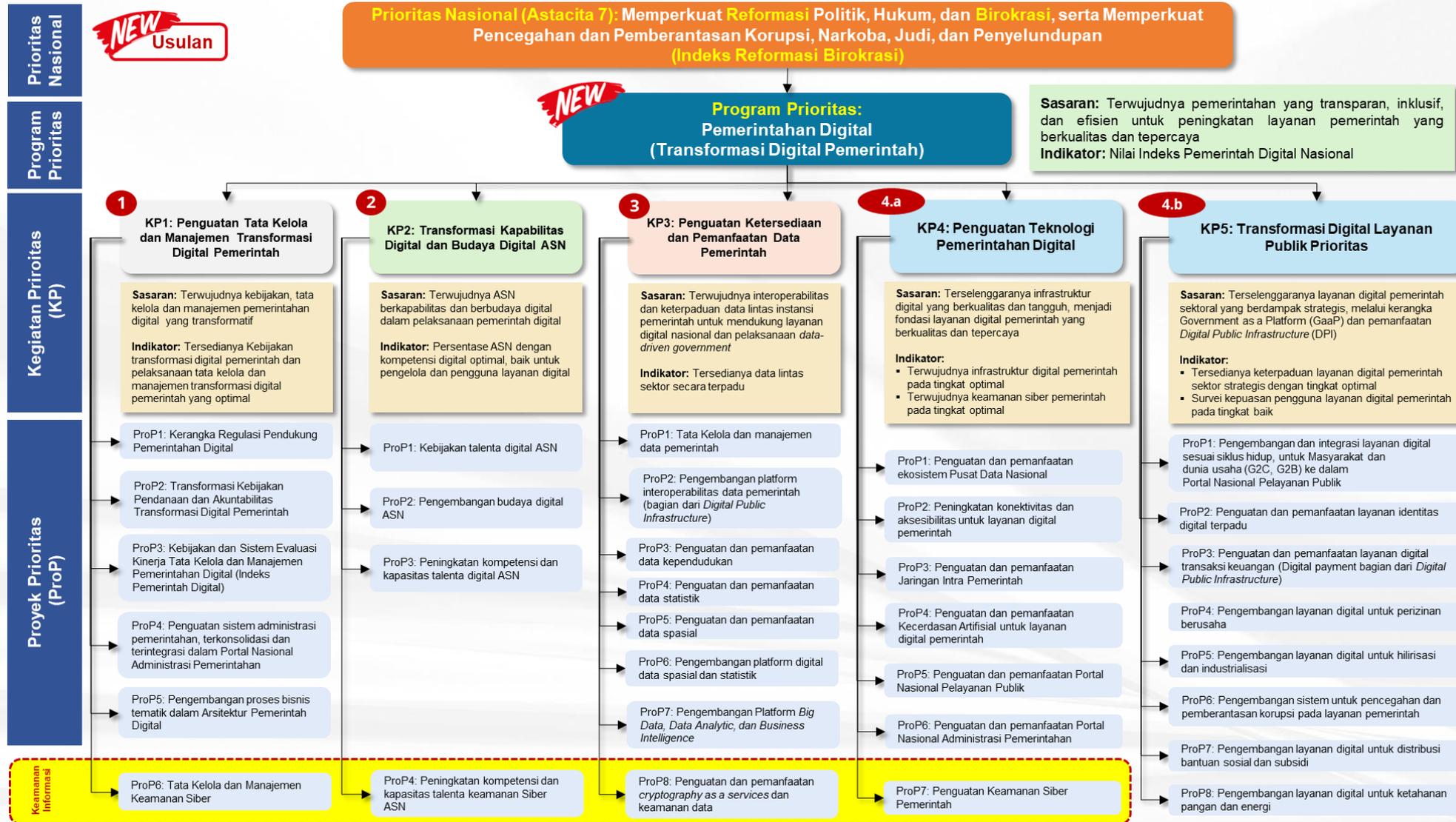
3. INISIATIF STRATEGIS

4. KERANGKA KERJA

5. REFERENSI ARSITEKTUR

6. DOMAIN ARSITEKTUR

7. TATA KELOLA



INISIATIF STRATEGIS PEMERINTAH DIGITAL NASIONAL

1. PENDAHULUAN

2. ARAH KEBIJAKAN

3. INISIATIF STRATEGIS

4. KERANGKA KERJA

5. REFERENSI ARSITEKTUR

6. DOMAIN ARSITEKTUR

7. TATA KELOLA

No.	Inisiatif Strategis	Keluaran	Penanggung Jawab
1.	Layanan kesehatan untuk semua	Penyelenggaraan layanan digital Kesehatan untuk semua terintegrasi pada aplikasi portal pelayanan public (INAKU)	
2.	Layanan Pendidikan berkualitas	Penyelenggaraan layanan Pendidikan berkualitas untuk semua terintegrasi pada aplikasi portal pelayanan public (INAKU)	
3.	Layanan perlindungan sosial yang adaptif	Penyelenggaraan layanan perlindungan social yang adaptif terintegrasi pada aplikasi portal pelayanan public (INAKU)	
4.	Layanan ketenagakerjaan melalui SIPK	Penyelenggaraan layanan digital ketenagakerjaan melalui SIPK yang terintegrasi pada aplikasi portal pelayanan public (INAKU)	
5.	Layanan penerbitan SIM Online/Surat BPKB	Penyelenggaraan layanan penerbitan SIM online/surat BPKB terintegrasi pada aplikasi portal pelayanan public (INAKU)	
6.	Layanan pernikahan/perceraian	Penyelenggaraan layanan pernikahan dan perceraian terintegrasi pada aplikasi portal pelayanan public (INAKU)	KUA, pengadilan agama, dukcapil
7.	Layanan perijinan berusaha	Penyelenggaraan layanan perijinan berusaha terintegrasi pada aplikasi portal pelayanan public (INAKU)	
8.	Layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Penyelenggaraan layanan digital administrasi kependudukan dan catatan sipil terintegrasi pada aplikasi portal pelayanan public (INAKU)	
9.	Layanan imigrasi	Penyelenggaraan layanan digital keimigrasian terintegrasi pada aplikasi portal pelayanan public (INAKU)	
10.	Layanan perpajakan	Penyelenggaraan layanan digital perpajakan terintegrasi pada aplikasi portal pelayanan public (INAKU)	

No.	Inisiatif Strategis	Keluaran	Penanggung Jawab
11.	Layanan perlindungan anak dan perempuan	Penyelenggaraan layanan digital perlindungan anak dan Perempuan pada aplikasi portal pelayanan public (INAKU)	
12.	Layanan informasi dan deteksi dini bencana berbasis geospasial	Penyelenggaraan layanan digital informasi dan deteksi dini bencana berbasis geospasial pada aplikasi portal pelayanan public (INAKU)	
13.	Layanan digital data terbuka pemerintahan	Penyelenggaraan layanan digital data terbuka pemerintahan pada aplikasi portal pelayanan administrasi pemerintahan (INAGov)	
14.	Layanan produk halal dan produk obat dan makanan tersertifikasi	Penyelenggaraan layanan digital produk halal dan produk obat dan makanan tersertifikasi pada aplikasi portal pelayanan public (INAKU)	
15.	Layanan single prosecution	Penyelenggaraan layanan digital single prosecution pada aplikasi portal pelayanan administrasi pemerintahan (INAGov)	
16.	Layanan subsidi tepat sasaran	Penyelenggaraan layanan digital subsidi tepat sasaran pada aplikasi portal pelayanan public (INAKU)	
17.	Layanan digital pertanian	Penyelenggaraan layanan digital bidang pertanian pada aplikasi portal pelayanan public (INAKU)	
18.	Layanan administrasi pemerintahan terpadu	Penyelenggaraan keterpaduan manajemen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan berbasis GRC (Governance, Risk, dan Compliance) terintegrasi pada portal administrasi pemerintahan (INAGOV)	
19.	Layanan manajemen ASN	Penyelenggaraan manajemen talenta, kompetensi digital ASN, single salary terintegrasi pada portal administrasi pemerintahan (INAGOV)	
20.	Layanan pusat data nasional	Penyelenggaraan layanan pusat data nasional terintegrasi pada portal administrasi pemerintahan (INAGOV)	
21.	Layanan keamanan siber, sandi, dan sinyal	Penyelenggaraan layanan keamanan siber, sandi, dan sinyal terintegrasi pada portal administrasi pemerintahan (INAGOV)	
22.	Layanan keberlangsungan layanan digital	Manajemen keberlangsungan layanan digital yang berupa analisa dampak organisasi (atau lebih dikenal business continuity plan), mitigasi risiko terkait layanan digital, penanganan insiden layanan digital, manajemen krisis layanan digital, rencana cadangan (contingency plan), manajemen pemulihan layanan digital	

PERUBAHAN KERANGKA KERJA ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL

1. PENDAHULUAN

2. ARAH KEBIJAKAN

3. INISIATIF STRATEGIS

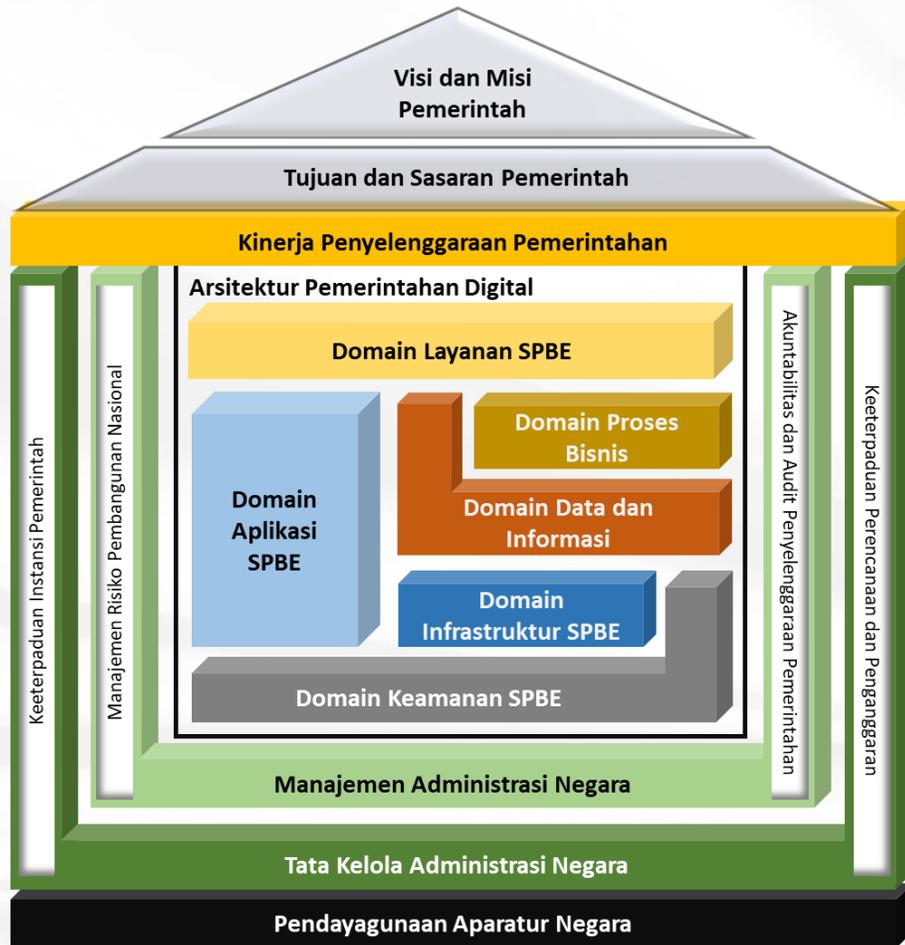
4. KERANGKA KERJA

5. REFERENSI ARSITEKTUR

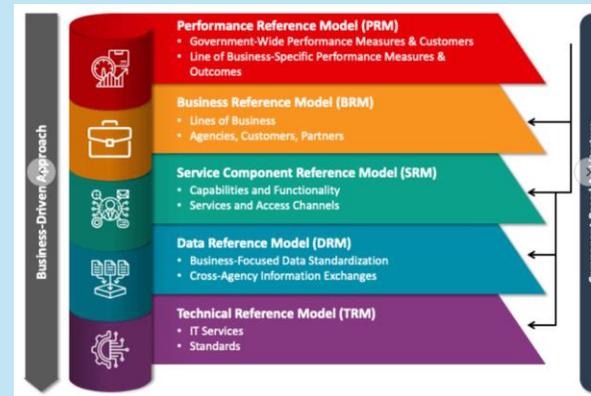
6. DOMAIN ARSITEKTUR

7. TATA KELOLA

PENAMBAHAN DOMAIN KINERJA



DASAR/BEST PRACTICE → FEAF

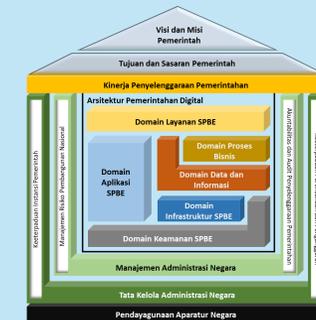


URGENSI

Agar IPPD memahami bahwa **Arsitektur SPBE** tujuan akhirnya adalah pada perbaikan tata kelola yang mendorong **peningkatan kinerja organisasi**

REFERENSI DAN METADATA

- Referensi Level 1 : Urusan Pemerintahan
- Referensi Level 2 : Inisiatif Strategis
- Referensi Level 3 : Indikator Kinerja-Probis
- Metadata: ID, Indikator Kinerja, Unit Kerja
- Keterkaitan antar domain : Proses Bisnis dan Layanan



PoC Pada
SIA SPBE



PERUBAHAN KERANGKA KERJA ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL

1. PENDAHULUAN

2. ARAH KEBIJAKAN

3. INISIATIF STRATEGIS

4. KERANGKA KERJA

5. REFERENSI ARSITEKTUR

6. DOMAIN ARSITEKTUR

7. TATA KELOLA

Referensi Arsitektur



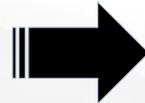
Suatu model yang menggambarkan komponen dasar dari arsitektur standar yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur.



Untuk mengidentifikasi layanan yang redundan dan serupa, dukung layanan bersama dan interoperabilitas antar sistem dan berikan panduan untuk memfasilitasi aplikasinya



Referensi Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan



Metadata Arsitektur



Informasi terstruktur yang mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai domain arsitekturnya



Mendefinisikan elemen pemodelan (konsep, relasi, batasan) yang mampu menggambarkan hubungan antara ketiganya.



Metadata, Atribut, dan Relasi Metadata

Domain Arsitektur



Komponen arsitektur yang menjelaskan substansi arsitektur



Mengidentifikasi target pengembangan dan target interoperabilitas berdasarkan pada masing-masing area



Domain Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan

PERUBAHAN REFERENSI ARSITEKTUR

Referensi Arsitektur Proses Bisnis

- Level 1 → sektor pemerintahan mengikuti pembagian kementerian
- Level 2 → urusan pemerintahan (tetap)
- Level 3 → fungsi pemerintahan (mengikuti perpres pembentukan K/L yang baru)

PERUBAHAN METADATA ARSITEKTUR

Metadata Arsitektur Proses Bisnis

Belum ada ada atribut yang menerangkan prasyarat ketersediaan proses bisnis dari sisi waktu (RTO – Recovery Time Objective),

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Bisnis/Urusan	Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Bisnis/Urusan	Merupakan uraian dari urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
4	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih
5	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.
Usulan tambahan Atribut Metadata		
6	RTO (Recovery Point Objective)	Prasyarat ketersediaan proses bisnis agar bisa pulih untuk bisa digunakan oleh lembaga terkait. Nilai berupa besaran waktu yang diharapkan agar proses bisnis bisa pulih.

PERUBAHAN DOMAIN ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL

1. PENDAHULUAN

2. ARAH KEBIJAKAN

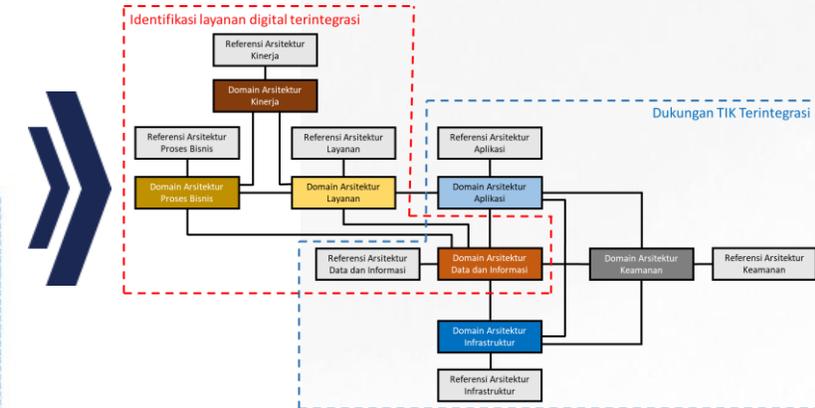
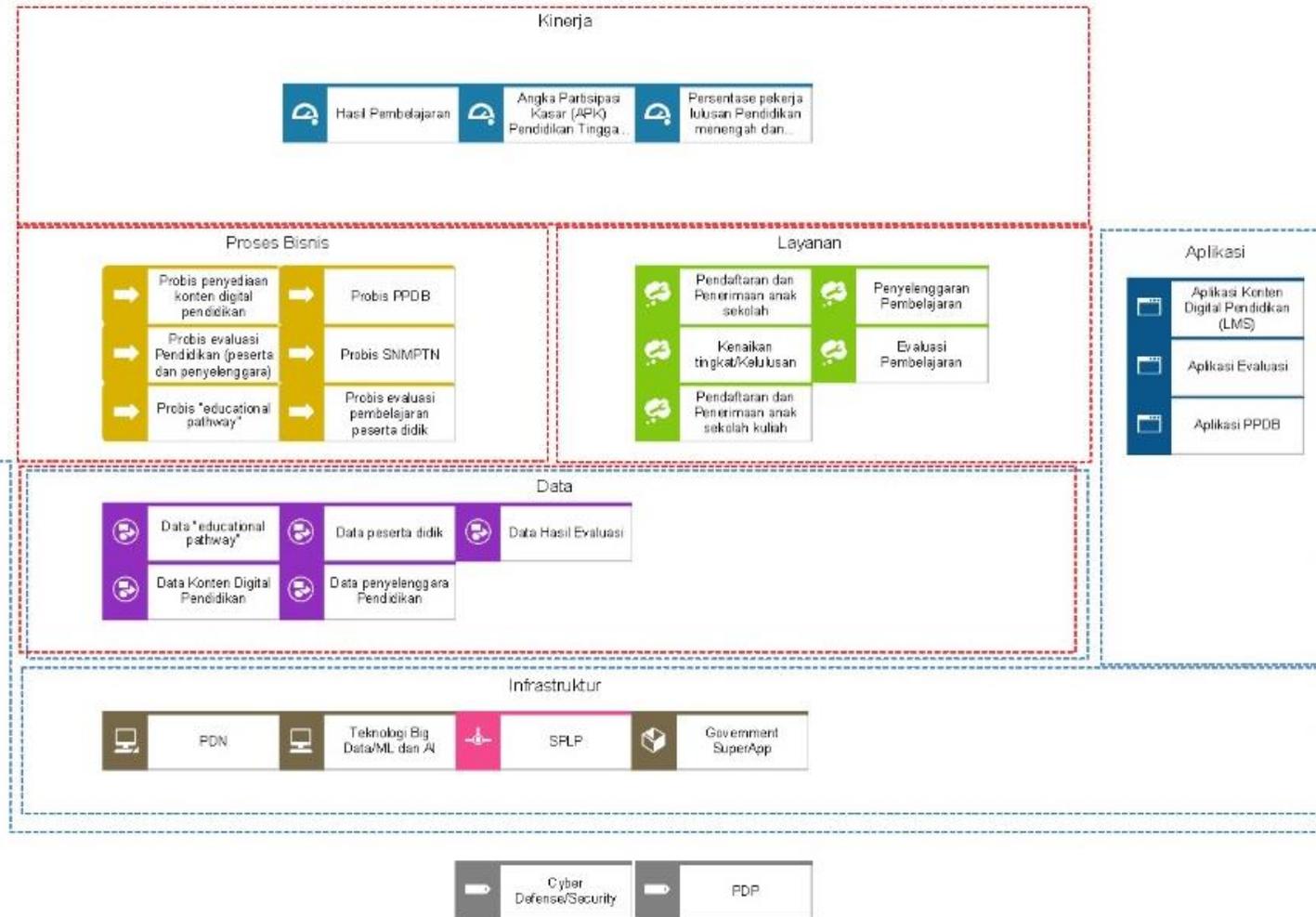
3. INISIATIF STRATEGIS

4. KERANGKA KERJA

5. REFERENSI ARSITEKTUR

6. DOMAIN ARSITEKTUR

7. TATA KELOLA



Inisiatif Strategis Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata

TATA KELOLA ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL

1. PENDAHULUAN

2. ARAH KEBIJAKAN

3. INISIATIF STRATEGIS

4. KERANGKA KERJA

5. REFERENSI ARSITEKTUR

6. DOMAIN ARSITEKTUR

7. TATA KELOLA

**Inisiatif Strategis
Arsitektur SPBE
Nasional 2025-2029**

Inisiatif Strategis Arsitektur SBPE tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan analisa dari regulasi, rencana Pembangunan (panjang dan menengah), analisa dari sumber lain, analisa tren teknologi



**Tim Arsitek SBPE
(Kapabilitas)**

Kemampuan (skills) dari tim arsitektur SPBE dalam menyusun dan mengelola Arsitektur SPBE

**Sistem Arsitektur
SPBE**

Penyusunan dan pengelolaan arsitektur SPBE yang selaras dari nasional sampai dengan IPPD

**Outcome dan
Manfaat Arsitektur
SPBE**

Realisasi implementasi Arsitektur SPBE lewat Arsitektur Solusi Tepat Guna harus bisa diukur sampai kepada manfaat dan outcome di level Inisiatif Strategis dan selaras dengan outcome RPJMN

Siklus penyusunan arsitektur mulai dari visioning sampai implementasi arsitektur SPBE

Arskitektur SPBE juga perlu dilakukan tata kelolanya termasuk arsitektur solusi tepat guna.

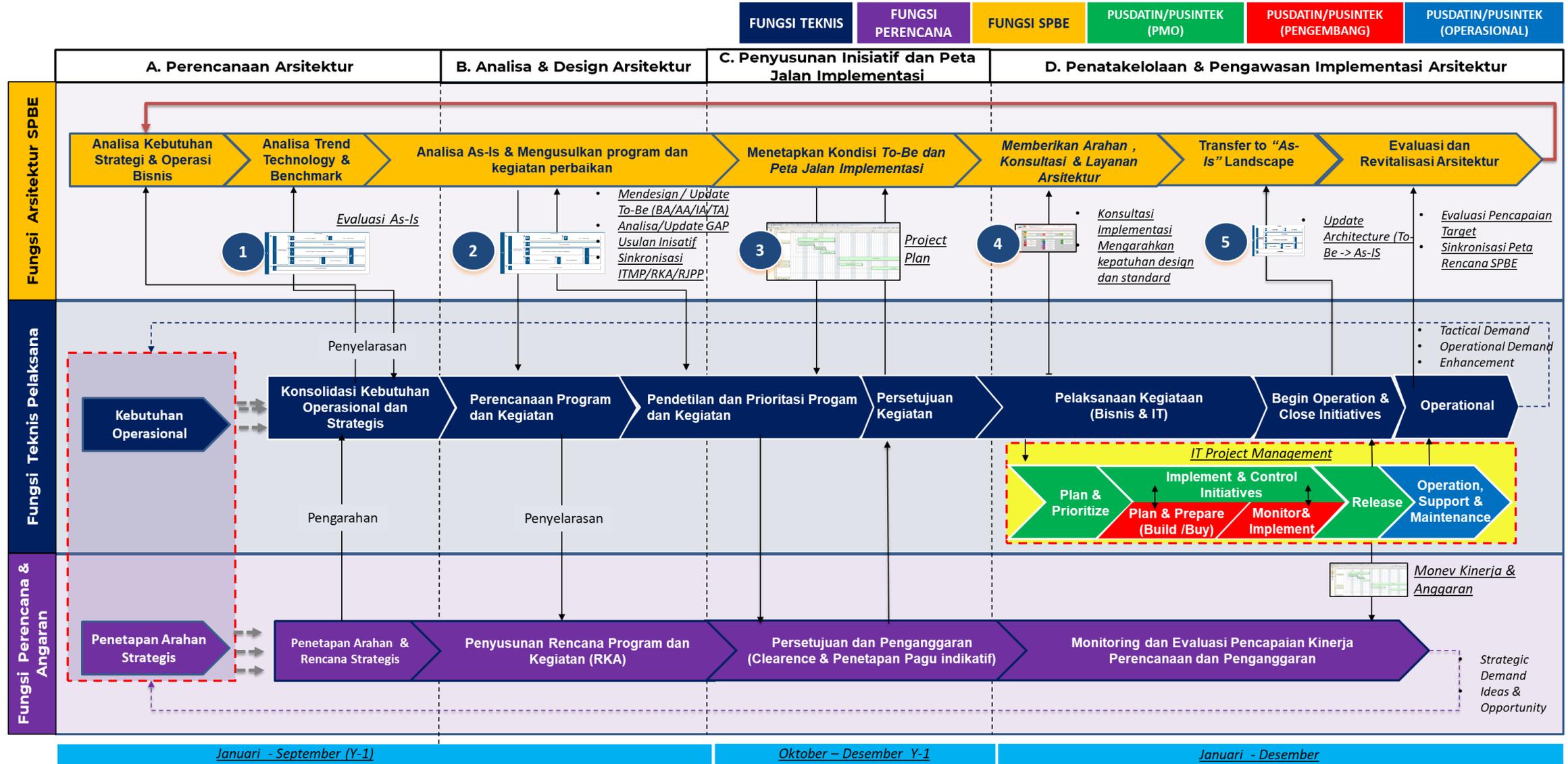
**Siklus Arsitektur
SBPE**

**Prinsip dan
Standar
Arsitektur SPBE**

Prinsip menjadi koridor/guideline dalam menyusun arsitektur SPBE dan merealisasikan arsitektur SPBE lewat arsitektur Solusi Tepat Guna.

Arsitektur Solusi Tepat Guna merujuk terhadap Standar yang telah ditetapkan oleh Arsitektur SPBE dalam membuat dan mengimplementasikan Solusi Tepat Guna

SIKLUS PENYUSUNAN ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL PADA INSTANSI



DUKUNGAN SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL (SIA SPBE V3)

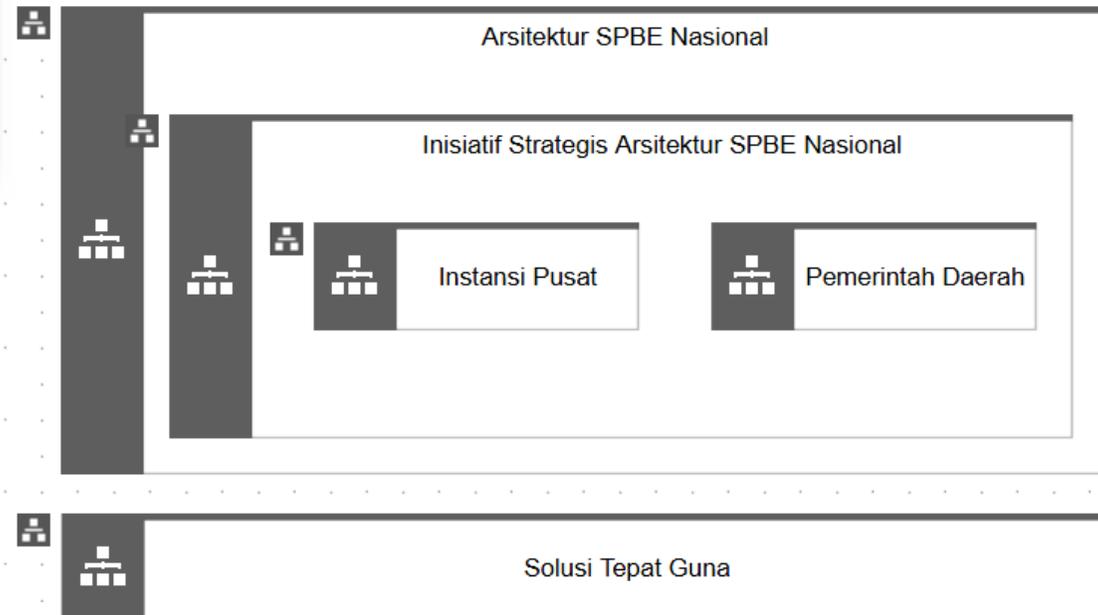
SIA-SPBE | Options

Login

Log in

[Forgot password?](#)

Structural element





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

TERIMA KASIH

 @kempnrb

 @kemenpanrb

 [www .menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

  @Kementerian PANRB